J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Lokal Dalam Rangka Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Sorong

Aswad Muhdar[1], Siti Nurjannah[2]
Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia
Email: aswadmuhdar@gmail.com

Article History:
Received: 02 April 2025
Revised: 22 April 2025
Accepted: 25 April 2025

Keywords: *Pembangunan ekonomi lokal, pengangguran, kemiskinan, Kota Sorong*

Abstract: *Setiap wilayah di Indonesia sering mengalami pengangguran dan kemiskinan, yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang terbatas dan banyaknya populasi. Kota Sorong, terutama di wilayah Indonesia Timur, Provinsi Papua Barat Daya, masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan pembangunan ekonomi lokal dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kota Sorong. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini berdampak positif pada masyarakat karena mengembangkan berbagai sektor ekonomi lokal, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, dan mendukung usaha mikro, usaha kecil, dan usaha besar.*

PENDAHULUAN

Fenomena sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, yang disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang terbatas dan banyaknya jumlah penduduk, bukan lagi fenomena sosial yang asing atau langka. Hampir setiap tahun, masalah ini dialami oleh banyak orang di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi masalah ini. Modal yang terbatas membuat lapangan kerja sempit. Pengangguran adalah salah satu masalah yang selalu dihadapi negara dan sulit dihindari. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, bekerja kurang dari waktu yang mereka tetapkan, atau sedang mencari pekerjaan (Rafiq et al., 2010).

Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga merupakan indikator bagi investor asing dalam melihat sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara sehingga menjadi peluang untuk beinvestasi pada negara tersebut, karena tingkat pengangguran yang rendah dapat menggambarkan stabilnya perekonomian sehingga ada ketertarikan investor asing untuk berinvestasi dan begitupun sebaliknya.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, yang berarti Indonesia memiliki modal tenaga kerja yang melimpah, namun juga memberikan tingkat kesempatan penduduk untuk menganggur menjadi tinggi jika tidak diiringi dengan pertumbuhan lapangan kerja. Jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan disetiap tahun, meskipun laju pertumbuhan penduduk semakin menurun, hal ini disebabkan oleh karena

penurunan angka kelahiran yang lebih cepat dari pada penurunan angka kematian.

Sangat penting untuk membahas masalah pengangguran dan kemiskinan ini dan merupakan masalah penting bagi suatu negara karena tingginya angka pengangguran dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara. Selain itu, pengangguran dapat dikaitkan dengan beberapa indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan rasio ketergangungan negasi, yang semuanya dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Jika pertumbuhan ekonomi sebuah negara meningkat, diharapkan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran di sana. Namun, kemiskinan dan pengangguran bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi; masalah ini secara perlahan dapat diselesaikan dengan melakukan pembangunan ekonomi lokal.

Adapun undang-undang yang mendukung akan kebijakan mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yaitu undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan dan berkaitan dengan pengangguran adalah undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dan peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi lokal yang menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran ini. Pembangunan ekonomi lokal diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah (Blakely & Leigh, 2010). Pendekatan pelaksanaan pembangunan ekonomi lokal ini sangat relevan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, dengan melihat dari setiap wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan menjanjikan.

Dalam hal tanggung jawab, pemerintah kota daerah harus memperhatikan dan menjamin hak-hak dasar warga negara atau masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi (Hak Ekonomi). Oleh karena itu, pemerintah kota daerah harus dapat membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan kondisi lokal setiap daerah dan beroperasi secara mandiri sesuai dengan undang-undang.

Strategi pembangunan yang menggunakan konsep kemandirian lokal tersebut sebetulnya adalah mengakomodasi konsep “ekonomi kerakyatan” yang menurut Dr. Marzuki, SE, DEA. Pemikiran dan strategi memberdayakan sektor ekonomi UMKM di Indonesia (2006,11-12) secara harfiah sistem ekonomi kerakyatan itu dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dimana kegiatan ekonomi atau usaha-usaha yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang popular dikalangan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya alam apa saja yang dapat meningkatkan ekonomi dan dapat diusahakan, yang kemudian disebut dengan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), terutama meliputi berbagai sektor sumber daya alam, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap kalangan masyarakat tanpa harus mengorbankan masyarakat lainnya dan melibatkan kepentingan pribadi.

Kota Sorong sebagai salah satu kota di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia bagian timur dengan potensi ekonomi yang besar. Dengan julukan “Kota Minyak”, Selain sebagai pusat industri minyak dan gas bumi, Kota Sorong juga memiliki kekayaan sumber daya alam seperti hasil laut, sektor kehutanan, sektor pertanian, dan pada sektor peternakan juga potensi-potensi pariwisata dan kebudayaan yang menjanjikan. Namun, ditengah potensi ini Kota Sorong masih menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup signifikan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Kota Sorong pada tahun 2024 mencapai 13,67%, dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 hingga 1 Februari 2023 mencapai 10,09%, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini menunjukkan ketidaksesuaian antara potensi ekonomi kota dan kondisi kesejahteraan masyarakat setempat. Tingkat kemiskinan Kota Sorong agak lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kondisi ini, dimana banyaknya masyarakat di berbagai macam kalangan khususnya usia produktif tidak memiliki pekerjaan tetap atau mendapatkan penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Situasi ini memunculkan kebijakan untuk menerapkan strategi pembangunan ekonomi lokal yang efektif guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengangguran adalah suatu fenomena dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya oleh sebab keterbatasan penyediaan lapangan kerja. Seseorang yang tidak bekerja, dan tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat disebabkan oleh karena ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta (Mankiw, 2013).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau dengan produktivitas mereka menciptakan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan dikarenakan mereka yang sudah diterima kerja tapi belum memulai bekerja (Sukirno, 2013).

Dalam standar internasional yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja, yang dengan secara aktif sedang berupaya mencari pekerjaan, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran menunjukan bahwa ada banyak sumber daya manusia yang terbuang dan tidak dipergunakan dengan semestinya. Para pengangguran merasa mereka memiliki potensi untuk memberikan kontribusi di berbagai bidang sesuai dengan keahlian mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukannya.

Dalam penelitian ini, peneliti merancang penelitian dengan mengetahui terlebih dahulu faktor faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pengangguran di Kota Sorong, serta memberikan strategi yang dapat menangani permasalahan pengangguran tersebut.

Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan setidaknya dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah *kemiskinan absolut*, yang menentukan berapa banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Ini juga merupakan kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki tingkat pendapatan dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti makanan dan perawatan medis. Kedua, *kemiskinan relatif* terjadi ketika seseorang atau kelompok memiliki tingkat pendapatan dan sumber daya yang lebih rendah sehingga tidak mampu memenuhi standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat. Kemiskinan relatif mencakup tidak hanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga kesenjangan sosial dan ekonomi yang menghalangi seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro, 2010). Kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai, kebutuhan dasar yang maksud adalah makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan (Malpita, 2014).

Untuk mengatur masalah kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk di kategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Di Indonesia sendiri seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya berada dibawah Rp401.220, perkapita perbulan sehingga dapat dikategorikan miskin. Sebaliknya kalau pengeluaran perkapitanya diatas garis kemiskinan, maka dikategorikan tidak miskin.

Teori Pembangunan Ekonomi Lokal

Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi berbasis lokal awal berkembang di negara Eropa sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi secara lokal (Zukunft im Zemtrum, 1993). Pembangunan ekonomi lokal adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah lokal atau kelompok masyarakat untuk mengatur sumber daya dalam kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah mereka (Zaaijer dan Sara, 1993). Penekanan pembangunan ekonomi lokal terletak pada pembangunan kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu daerah sebagai contoh kebijakan yang menggunakan potensi masyarakat, institusi, dan orang-orang yang tinggal di sana (Zaaijer dan Sara, 1993).

Indratno dan Agustina (2005) mengatakan bahwa salah satu langkah dalam pengentasan kemiskinan adalah pembangunan ekonomi lokal. Ini sejalan dengan pendapat Afifi (2007), yang menganggap pembangunan ekonomi lokal sebagai strategi pengentasan kemiskinan, dengan menganggap masyarakat miskin sebagai aset yang dapat menjadi kekuatan besar dalam memacu perkembangan ekonomi daerah. Konsep pembangunan ekonomi lokal merupakan salah satu strategi yang dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama mampu mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi (Artiningsih dan Handayani 2009). Selanjutnya Supriyadi (2007) mempertegas bahwa pembangunan ekonomi lokal bertujuan memberdayakan orang-orang lokal, pemerintah lokal, dan industri lokal. Ekonomi sangat penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat (Dalmeri, 2014, p. 328).

Berdasarkan tujuan pembangunan ekonomi lokal tersebut maka untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu (Supriyadi, 2007) :

1. Perluasan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha
2. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
3. Keberdayaan lembaga usaha mikro dalam proses produksi dan pemasaran
4. Keberdayaan lembaga jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Berdasarkan pada beberapa definisi dan pemahaman konsep pembangunan ekonomi lokal sebelumnya, pembangunan ekonomi lokal adalah proses pembangunan ekonomi di mana pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah berpartisipasi secara aktif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di daerah mereka. Keterlibatan pihak berwenang dalam proses tersebut mencakup menentukan tidak hanya apa yang harus dilakukan tetapi juga metode untuk melakukannya. Untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat, aktor lokal memiliki peran strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena atau masalah sosial dari sudut pandang subjek. Fokus utama penelitian kualitatif adalah untuk mempelajari dan memahami pengalaman, pandangan, dan perilaku individu atau kelompok dalam konteks tertentu.

Metode ini sering menggunakan pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, analisis dokumen, atau diskusi kelompok. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan (Sugiono, 2017).

Jenis penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pembangunan ekonomi lokal dalam rangka mengupayakan pengurangan pengangguran dan kemiskinan di Kota Sorong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Ekonomi Kota Sorong

Berdasarkan besaran produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencapai 16.828,67 miliar pada tahun 2023 dan 10.262,67 miliar pada tahun 2010. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi kota Sorong tumbuh sebesar 0,97% pada tahun 2023, lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 1,14%. Lapangan usaha mengalami pertumbuhan tertinggi.

Struktur perekonomian kota sorong pada tahun 2023 dari sisi produksi, terdapat tiga lapangan usaha yang di dominasi, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 22,22 persen, konstruksi sebesar 15,81 persen dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 13,62 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi contributor sebesar nilai PDRB Kota Sorong dengan nilai sebesar 59,02 persen, di ikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 18,68 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 17,91 persen.

Pengaruh Pengangguran di Kota Sorong

Pengangguran adalah fenomena sosial dan masalah ekonomi yang terjadi ketika banyak orang dibandingkan dengan sedikit lapangan pekerjaan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya produktivitas individu. Di Kota Sorong, seperti di tempat lain, pengangguran memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kota Sorong yang tidak memiliki pekerjaan akan berdampak pada beberapa hal, seperti:

1. Menurunkan kesejahteraan dan kemakmuran
2. Meningkatkan kemungkinan kemiskinan akan terjadi
3. Mengurangi pertumbuhan ekonomi
4. Mengurangi aktivitas perekonomian
5. Menyebabkan ketidakstabilan politik

Dengan demikian, risiko pengangguran mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi Kota Sorong selain individu yang mengalaminya. Penanganan pengangguran memerlukan pendekatan masyarakat yang melibatkan pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan yang mendukung sektor ekonomi lokal, seperti UMKM.

Peran Pemerintah Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Lokal

Pemerintah berfungsi sebagai sumber harapan masyarakat dan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pembangunan ekonomi lokal didukung oleh kebijakan dan regulasi pemerintah. Ini termasuk kebijakan perpajakan yang adil, aturan perdagangan, dan insentif untuk industri yang potensial. Infrasruktur, pelatihan tega kerja, dan

insentif untuk usaha kecil dan menengah (UKM) adalah beberapa contoh dari kebijakan ini.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam pendistribusian anggaran negara dapat dialokasikan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ini dapat mencakup dana untuk proyek infrastruktur, bantuan kepada usaha lokal, atau peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan yang mendukung produktivitas ekonomi.

Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan komunikasi sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang dan membiayai proyek infrastruktur yang memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan daya saing di wilayah tersebut.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal, pemerintah dapat memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat lokal. Ini penting agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja.

Melalui kebijakan yang mendukung lingkungan bisnis, Pemerintah dapat menarik investasi dalam dan luar negeri melalui kebijakan yang mendukung lingkungan bisnis. Ini memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan industri lokal, dan meningkatkan ekonomi lokal.

Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat untuk membuat program yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Contoh kerja sama ini dapat berupa program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung barang lokal atau pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal.

Untuk menjaga pembangunan ekonomi lokal Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa sektor-sektor tertentu, seperti lingkungan hidup atau hak pekerja, tidak terganggu oleh pertumbuhan ekonomi untuk memastikan pembangunan ekonomi lokal berjalan dengan baik dan adil.

Salah satu upaya pemerintah Kota Sorong untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran adalah melakukan pembangunan ekonomi lokal. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi lokal di tingkat lokal dikenal sebagai pembangunan ekonomi lokal. Di Kota Sorong, pemerintah berusaha mendorong pembangunan ekonomi lokal untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, dan pengembangan sektor ekonomi yang bergantung pada potensi lokal adalah bagian dari rencana ini.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah salah satu upaya pemerintah Kota Sorong untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Kota Sorong mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM untuk memberikan lapangan pekerjaan. Pemerintah Kota Sorong mendukung pelaku usaha dengan menyediakan program pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas produk dan manajemen bisnis mereka. Ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah kota dalam mengatasi dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di kota tersebut.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi kota Sorong. Ekonomi lokal secara signifikan didorong oleh kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kota Sorong memiliki 8.000 UMKM, menempati peringkat tertinggi di provinsi Papua Barat Daya. Menurut analisis mendalam, keberhasilan UMKM di Kota Sorong tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah sebagai pendorong, regulator, dan katalisator.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Sorong adalah pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pertumbuhan sektor ekonomi lokal seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata. Mereka juga berusaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung untuk menarik investasi. Selain itu, kerja sama antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan mendukung UMKM, diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Sorong. Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Basrowi, Yuliana, S., Prayogo, A. D., Liana, J. E., Andriansyah, M., & Astridinata, I. K. (2018). Pengangguran (Perspektif Teoretis). *Osf.Io*, 1–14. Retrieved from https://osf.io/p43wt/download

Gifelem, M., Masinambow, V. A. ., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(6), 25–36. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/49671

Jaelani, M. A., & Fidaris, N. (2024). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *14*(2), 151–162. https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4953

Khodijah Ishak, SH.I, M. E. S. A. (2007). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGGURAN DAN INFLIKASINYATERHADAP INDEK PEMBANGUNAN DI INDONESIA Oleh. *Jurnal Ikraith-Ekonomika*, *вы12у*(235), 245. Retrieved from http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf

Moehaditoyo, srie hartutie. (1945). Pembangunan Ekonomi Lokal Di Era Otonomi Daerah Srie Hartutie Moehaditoyo. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, *5*(April 2009).

Permadhy, Y. T., & Sugianto. (2020). Faktor Penyebab Pengangguran Dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. *IKRA-ITH Ekonomika*, *2*(3), 54–63. Retrieved from https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/583

Saputra, E., & Agustina, D. (2021). Peran Institusi Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *2*(2), 174. https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3687